PT Marga Lingkar Jakarta

Laporan Keuangan Tanggal 30 Juni 2020

Dan Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut

(Unaudited)

PT MARGA LINGKAR JAKARTA

Connecting Jakarta

PT MARGA LINGKAR JAKARTA
Connecting Jakarta

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 30 JUNI 2020 DAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PT MARGA LINGKAR JAKARTA
No. 663/AA/MLJ/VII/2020

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Charles Lendra
   Alamat : Plaza Tol Meruya
   Jl. Raya Meruya Utara No.1, Jakarta Barat 11620, Indonesia
   Nomor Telepon : (021) 5890 8462
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Subianto Setjawardaja
   Alamat : Plaza Tol Meruya
   Jl. Raya Meruya Utara No.1, Jakarta Barat 11620, Indonesia
   Nomor Telepon : (021) 5890 8462
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta;
2. Laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan PT Marga Lingkar Jakarta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Marga Lingkar Jakarta.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 27 Juli 2020
PT MARGA LINGKAR JAKARTA

Charles Lendra
Direktur Utama

Subianto Setjawardaja
Direktur

AND/TWS

PT. MARGA LINGKAR JAKARTA
Kantor Pusat :
Graha Simatupang Tower 2B Lt. 2
JL. TB Simatupang Kav. 38 Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 Telp. (021) 29712762

Kantor Operasional :
JL. Meruya Utara No. 1 Jakarta Barat 11620
Telp. (021) 589 08462
Fax. (021) 589 08447

PT Marga Lingkar Jakarta
Laporan Posisi Keuangan
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Aset			
Aset Lancar			
Kas Dan Setara Kas	2l 2c 4 28 29	163.958.242	162.998.536
Piutang Lain-Lain - Neto	2l 5 28 29 30	8.218.240	11.581.777
Uang Muka Dan Biaya Dibayar Di Muka	2d 6	687.869	119.682
Total Aset Lancar		**172.864.351**	**174.699.995**
Aset Tidak Lancar			
Dana Ditetapkan Penggunaannya	2m 7 29	325.438.500	309.438.500
Uang Muka Kontraktor	11	1.433.877	-
Aset Tetap - Neto	2b 2e 8	29.219.951	31.114.710
Aset Takberwujud Lainnya			
Hak Pengusahaan Jalan Tol - Neto	2f 9	1.634.679.154	1.635.687.156
Perangkat Lunak	2g 10	1.357.512	1.648.407
Aset tidak lancar lainnya		20.000	20.000
Total Aset Tidak Lancar		**1.992.148.994**	**1.977.908.773**
Total Aset		**2.165.013.344**	**2.152.608.768**
Liabilitas Dan Ekuitas			
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	2m 12 28 29 30	1.123.151	660.845
Utang Kontraktor Dan Konsultan	2m 13 28 29 30	1.777.862	1.777.862
Utang Pajak	2i 15a	264.854	201.017
Beban Akrual	2m 16 28 29 30	61.254.925	31.113.473
Utang Retensi	2l 2m 17 28 29 30	3.878.812	2.156.217
Utang Lain-Lain	2b 2l 2m 14 28 29	10.685.119	11.386.310
Liabilitas Jangka Pendek Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			
Provisi Pelapisan Jalan Tol	2f 2n 19 29 30	5.108.053	21.798.947
Hutang Obligasi Serie A	2m 18 29 30	199.895.465	199.729.543
Total Liabilitas Jangka Pendek		**283.988.240**	**268.824.215**
Liabilitas Jangka Panjang			
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	2i 15c	40.026.162	34.721.071
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi Bagian Yang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			
Hutang Obligasi Serie B,C,D,E	2m 18 29 30	1.295.749.819	1.295.428.875
Provisi Pelapisan Jalan Tol	2f 2n 19 29 30	8.980.000	4.661.161
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2j 20	4.133.519	3.644.122
Total Liabilitas Jangka Panjang		**1.348.889.500**	**1.338.455.229**
Total Liabilitas		**1.632.877.741**	**1.607.279.444**

PT Marga Lingkar Jakarta
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan		30 Juni 2020	31 Desember 2019
Ekuitas				
Modal Saham				
Modal Dasar - Nilai Nominal Rp1.000 per saham, 655.727.000 saham				
Modal Ditempatkan Dan Disetor penuh - 655.727.000 saham		21	655.727.000	655.727.000
Defisit			(123.914.586)	(110.720.866)
Penghasilan Komprehensif Lain - Keuntungan Aktuarial Liabilitas Imbalan Kerja	2j	20	323.190	323.190
Total Ekuitas			**532.135.604**	**545.329.324**
Total Liabilitas Dan Ekuitas			**2.165.013.344**	**2.152.608.768**

PT Marga Lingkar Jakarta
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Pendapatan Tol dan Usaha Lainnya			
Pendapatan Tol	2k 22	114.441.767	148.870.363
Pendapatan Usaha Lainnya	2k 22	778.911	116.089
Beban Pendapatan			
Beban Tol	2k 22	(50.960.854)	(62.008.001)
Laba Bruto		**64.259.824**	**86.978.451**
Beban Umum Dan Administrasi	2k 25	(21.141.123)	(16.782.063)
Penghasilan (Beban) Lain-Lain	26	(570.741)	168.087
Laba Usaha		**42.547.960**	**70.364.476**
Penghasilan Keuangan	24	15.961.907	13.440.506
Beban Pajak Atas Penghasilan Keuangan	24	(3.192.381)	(2.688.101)
Biaya Keuangan - Neto	2k 27	(63.206.116)	(63.203.441)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak Penghasilan		**(7.888.630)**	**17.913.440**
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan	2i 15d	(5.305.090)	(5.627.720)
(Rugi) Laba Tahun Berjalan		**(13.193.720)**	**12.285.721**
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			
Pos-Pos Yang Tidak Akan Direklasifikasi			
Ke Laba Rugi Tahun Berikutnya :			
Pengukuran Kembali Liabilitas Imbalan Kerja	20	-	-
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan Terkait		-	-
Total Penghasilan (Rugi)			
Komprehensif Tahun Berjalan		**(13.193.720)**	**12.285.721**
Laba (Rugi) Per Saham Dasar	2p 32	**(20,12)**	**18,74**

PT Marga Lingkar Jakarta
Laporan Arus Kas
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan Pendapatan Tol		113.408.485	157.091.890
Pembayaran Kepada Pihak Ketiga		(26.305.158)	(35.267.261)
Pembayaran Kepada Direksi Dan Karyawan		(11.623.391)	(12.584.724)
Pembayaran Bunga Pinjaman		(62.719.250)	(62.719.250)
Penerimaan Lain-Lain		13.860.413	10.317.783
Kas Neto Yang Diperoleh Dari Aktivitas Operasi		**26.621.100**	**56.838.438**
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi			
Perolehan Aset Tetap	8	(2.608.993)	(2.001.156)
Perolehan Hak Pengusahaan Jalan Tol	9	(7.052.400)	-
Kas Neto Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi		**(9.661.393)**	**(2.001.156)**
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan			
Pencairan (Penempatan) DTP - Obligasi	7	(16.000.000)	(46.000.000)
Kas Neto Yang Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		**(16.000.000)**	**(46.000.000)**
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas Dan Setara Kas		**959.707**	**8.837.282**
Kas Dan Setara Kas Awal Tahun	4	**162.998.536**	**149.965.799**
Kas Dan Setara Kas Akhir Tahun	4	**163.958.242**	**158.803.081**

PT Marga Lingkar Jakarta
Laporan Perubahan Ekuitas
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

	Catatan	Modal Saham	Defisit	Penghasilan Komprehensif Lain	Total Ekuitas - Bersih
Saldo tanggal 31 Desember 2018		**655.727.000**	**(152.493.065)**	**820.826**	**504.054.761**
Rugi tahun berjalan			41.772.198		41.772.198
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	20			(497.635)	(497.635)
Saldo tanggal 31 Desember 2019		**655.727.000**	**(110.720.867)**	**323.191**	**545.329.324**
Rugi tahun berjalan			(13.193.720)		(13.193.720)
Penghasilan komprehensif lain - pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	20				
Saldo tanggal 30 Juni 2020		**655.727.000**	**(123.914.587)**	**323.191**	**532.135.604**

PT Marga Lingkar Jakarta
Catatan Atas Laporan Keuangan
Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2020
(Disajikan Dalam Ribuan Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Marga Lingkar Jakarta ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 26 Tanggal 24 Agustus 2009 yang dibuat di hadapan Edi Priyono, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran Dasar Perusahaan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45700.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 15 September 2009. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir pada tanggal 12 Desember 2019 dengan Akta No. 03 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. menyangkut perubahan Direksi dan Komisaris PT Marga Lingkar Jakarta. Perubahan Anggaran Dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0014092. Tahun 2019 tanggal 12 Desember 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan adalah melaksanakan pengusahaan Jalan Tol JORR W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk), yang meliputi pendanaan, perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar (JORR) Seksi W2 Utara, serta usaha-usaha lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. melakukan pekerjaan perencanaan;
b. membangun jalan dan jembatan, bangunan pelengkap jalan, dan fasilitas tol;
c. pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol, termasuk memungut dan menggunakan uang tol;
d. menggunakan ruang milik jalan tol untuk usaha lain yang berkaitan dengan pengoperasian jalan tol, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau;
e. menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b,c dan d.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersial pada bulan Januari 2014.

Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol: Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka.

Entitas induk dan entitas induk terakhir Perusahaan adalah PT Jasa Marga (Persero) Tbk, sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Plaza Tol Meruya, Jalan Raya Meruya Utara No. 1, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, dan Karyawan

Susunan Dewan Komisaris Perusahaan adalah sebagai berikut :

		30 Juni 2020	31 Desember 2019
Dewan Komisaris			
Komisaris Utama	:	Gunung Kartiko	Gunung Kartiko
Komisaris	:	Frans S. Sunito	Frans S. Sunito
Komisaris Independen	:	Djarot Trisulistyo	Djarot Trisulistyo

Berdasarkan surat keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Perusahaan, terdapat pengukuhan pemberhentian dengan hormat Komisaris Independen Perusahaan yakni Arief Witjaksono terhitung sejak tanggal yang bersangkutan meninggal dunia yaitu tanngal 12 November 2019

1. UMUM (lanjutan)

b. Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Internal Audit, dan Karyawan (lanjutan)

dan pengangkatan Djarot Trisulistyo sebagai Komisaris Independen terhitung sejak tanggal 12 Desember 2019 dan berlaku efektif berdasarkan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 12 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Rina Utami Djauhari, S.H..

Susunan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut :

		30 Juni 2020	31 Desember 2019
Direksi			
Direktur Utama	:	Charles Lendra	Charles Lendra
Direktur	:	Subianto Setjawardaja	Indrajanti

Berdasarkan surat keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham Perusahaan, terdapat pergantian Direktur Perusahaan yakni Indrajanti menjadi Subianto Setjawardaja sebagai Direktur Utama terhitung sejak tanggal 02 Januari 2020 dan berlaku efektif berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris Rina Utami Djauhari, SH.

Susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut :

		30 Juni 2020	31 Desember 2019
Komite Audit			
Ketua Komite Audit	:	Djarot Trisulistyo	Djarot Trisulistyo
Anggota Komite Audit	:	Bambang Sulistiyo	Bambang Sulistiyo
Anggota Komite Audit	:	Tri Riyaningsih	Tri Riyaningsih

Pembentukan dan Pengangkatan Komite Audit PT Marga Lingkar Jakarta sudah mengikuti ketentuan POJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Susunan Internal Audit Perusahaan adalah sebagai berikut :

		30 Juni 2020	31 Desember 2019
Internal Audit			
Internal Audit	:	Neneng Fathiah	Neneng Fathiah

Pembentukan dan Pengangkatan Internal Audit serta Penyusunan Piagam Unit Audit Internal sudah mengikuti ketentuan POJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, Perusahaan memiliki karyawan tetap masing-masing sebanyak 125 dan 130 orang (tidak diaudit).

c. Pengaturan Bersama

Perusahaan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Integrasi Sistem Transaksi Pembayaran Tol Ruas Tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan - Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1, E2, E3 (Taman Mini – Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E2a, Ns Direct (Rorotan-Kebon Bawang) Dan Jalan Tol Pondok Aren – Ulujami dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Jakarta Lingkar Baratsatu (Catatan 31d).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dari Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") dan peraturan yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan metode akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disajikan dengan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK")

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar-standar dan amandemen yang relevan terhadap kegiatan operasional dan bisa memberikan dampak terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK 71

Perusahaan menerapkan PSAK 71 "Instrumen Keuangan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 71 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK 72

Perusahaan menerapkan PSAK 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020. Penerapan atas PSAK 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perusahaan.

Penerapan atas PSAK 73

Perusahaan menerapkan PSAK 73 "Sewa" secara efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Dampak terhadap laporan keuangan

Pada saat penerapan PSAK 73, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip-prinsip dalam PSAK 30 "Sewa". Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020. Rata-rata tertimbang suku bunga inkremental yang digunakan adalah sebesar 7,07%. Aset hak-guna diukur pada jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran di muka atau pembayaran sewa yang masih harus dibayar sehubungan dengan sewa yang diakui di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2019. Dengan menerapkan standar ini, pada tanggal 1 Januari 2020 aset tetap Perusahaan meningkat sebesar Rp 833.562 yang terdiri dari pengakuan liabilitas sewa yang sebelumnya diakui sebagai sewa operasi sebesar Rp 833.562.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan (lanjutan)

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	Jumlah
Komitmen sewa operasi tidak diungkapkan pada tanggal 31 Desember 2019	1.034.672
Jumlah komitmen sewa operasi pada 1 Januari 2020	**1.034.672**
Didiskontokan dengan menggunakan rata-rata tertimbang suku bunga inkremental Perusahaan pada tanggal awal penerapan	833.562
Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020	**833.562**

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perusahaan menerapkan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa;
- sewa operasi yang masa sewanya berakhir dalam 12 bulan dari 1 Januari 2020 diperlakukan sebagai sewa jangka pendek;
- menggunakan tinjauan ke belakang (*hindsight*) dalam menentukan masa sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa;
- untuk tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa berdasarkan kelas asset pendasar;
- mengandalkan penilaian apakah sewa bersifat memberatkan sesuai PSAK 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi” segera sebelum tanggal penerapan awal sebagai alternatif untuk melakukan tinjauan penurunan nilai.

c. Kas dan Setara Kas

Deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatan yang tidak dibatasi penggunaannya diklasifikasikan sebagai “Setara Kas”.

Bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk digunakan sebagai jaminan tidak diklasifikasikan sebagai bagian dari “Kas dan Setara Kas” melainkan disajikan pada akun ”Dana Ditetapkan Penggunaannya” dan sebagai bagian dari “Aset Tidak Lancar”.

d. Uang Muka dan Biaya Dibayar Di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi dengan menggunakan metode garis lurus selama masa yang diharapkan dapat memberikan manfaat.

e. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penyisihan penurunan nilai, jika ada.

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line-method) untuk mengalokasikan harga perolehan hingga mencapai nilai residu sepanjang estimasi masa manfaatnya sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat
Bangunan	10 - 20 tahun
Perlengkapan lalu lintas	04 - 10 tahun
Partisi dan perlengkapan kantor	03 - 05 tahun

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada tahun terjadinya. Sedangkan pemugaran dan penambahan dalam jumlah material dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dilepas, biaya perolehan serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Aset tetap dalam konstruksi disajikan sebagai bagian dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dibangun atau siap digunakan.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan kondisi teknis.

f. Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Berdasarkan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ("PPJT"), Perusahaan memiliki Hak Pengusahaan Jalan Tol ("HPJT") yang merupakan hak untuk membebankan pengguna jasa publik berdasarkan perjanjian jasa konsesi (Catatan 30a).

Infrastruktur yang diatur dalam PPJT tidak diakui sebagai aset tetap karena PPJT tidak memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengendalikan penggunaan infrastruktur jasa publik. Perusahaan memiliki akses untuk mengoperasikan infrastruktur dalam menyediakan jasa publik untuk kepentingan pemberi konsesi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam PPJT.

Perusahaan membukukan perjanjian konsesi jasa sebagai model aset takberwujud karena memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Pada saat pengakuan awal, aset konsesi dicatat pada nilai wajar dari imbalan yang akan diterima. Aset konsesi ini adalah aset hak pengusahaan jalan tol yang akan diamortisasi selama sisa masa hak konsesi sejak tanggal pengoperasian ruas jalan tol. Selama masa konstruksi, akumulasi biaya perolehan dan konstruksi jalan tol diakui sebagai aset konsesi dalam penyelesaian. Amortisasi mulai dibebankan pada saat aset konsesi tersebut siap digunakan.

Aset konsesi akan dihentikan pengakuannya pada saat berakhirnya masa konsesi. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian saat berakhirnya masa konsesi karena diharapkan telah diamortisasi secara penuh dan akan diserahkan kepada Badan Pengatur Jalan Tol ("BPJT") tanpa syarat.

Perusahaan tidak dapat memindahkan/mengalihkan haknya berdasarkan PPJT, dan tidak dapat memindahkan/mengalihkan tanggung jawab dan kewajibannya berdasarkan PPJT tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemerintah.

Aset konsesi ini akan diserahkan ke Pemerintah/BPJT pada saat akhir masa konsesi dan, pada saat itu, seluruh akun yang berhubungan dengan aset konsesi dihentikan pengakuannya.

Selama periode hak pengusahaan jalan tol, aset Hak Pengusahaan Jalan Tol dikeluarkan dari laporan posisi keuangan Perusahaan jika jalan tol diserahkan (dikuasakan) kepada pihak lain atau Pemerintah mengubah status jalan tol menjadi jalan non tol atau tidak ada manfaat ekonomi yang dapat diharapkan dari penggunaannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aset diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun pelaporan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol (lanjutan)

Aset konsesi diamortisasi selama masa konsesi dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Aset hak pengusahaan jalan tol untuk jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode unit pemakaian berdasarkan volume lalu lintas/jumlah pengguna jalan tol.
2. Aset hak pengusahaan jalan tol selain jalan dan jembatan tol diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus.

Provisi pelapisan jalan tol

Dalam pengoperasian jalan tol, Perusahaan mempunyai kewajiban untuk menjaga kualitas sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, yaitu antara lain dengan melakukan pelapisan ulang jalan tol secara berkala. Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi pelapisan ulang jalan tol diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini.

Biaya pinjaman

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk persiapan digunakan sesuai tujuannya atau dijual dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya aset. Semua biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada periode terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari biaya bunga dan biaya lain yang ditanggung oleh Perusahaan sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya, dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya secara substansi seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian sesuai maksud penggunaannya selesai secara substansial.

g. Aset Takberwujud - Lainnya

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada nilai perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Aset takberwujud diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dan dievaluasi apabila terdapat indikasi adanya penurunan nilai untuk aset takberwujud. Periode dan metode amortisasi untuk aset tak berwujud dengan umur manfaat ditelaah setidaknya setiap akhir tahun tutup buku.

Aset takberwujud Perusahaan terdiri dari perangkat lunak komputer (software) diamortisasi selama masa manfaat sepanjang 3 (tiga) tahun.

h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Perusahaan menilai pada setiap periode pelaporan tahunan indikasi penurunan nilai aset. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas atau aset takberwujud yang belum dapat digunakan) diperlukan, maka Perusahaan membuat estimasi jumlah terpulihkan atas aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset yang mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui.

Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa masa manfaatnya.

i. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Beban atau manfaat pajak penghasilan merupakan jumlah atau neto dari pajak penghasilan badan saat ini dan pajak tangguhan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan dan tahun sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba operasi sebelum pajak penghasilan yang dilaporkan dalam laba atau rugi karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Jumlah tambahan pajak dan denda pajak yang ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak ("SKP") diakui sebagai bagian dari beban pajak kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain periode berjalan, kecuali jika diajukan upaya penyelesaian selanjutnya. Jumlah tambahan pajak dan denda yang ditetapkan dengan SKP ditangguhkan pembebanannya sepanjang memenuhi kriteria pengakuan aset.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada akhir periode pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk setiap perbedaan temporer kena pajak.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi, sejauh terdapat kemungkinan besar bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal belum dikompensasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat dari aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan ketika tidak lagi terdapat kemungkinan bahwa akan terdapat penghasilan kena pajak yang memungkinkan semua atau sebagian dari aset pajak tangguhan dapat digunakan.

Penelaahan dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan atas aset pajak tangguhan yang tidak diakui sebelumnya dan aset pajak tangguhan tersebut diakui sepanjang kemungkinan besar penghasilan kena pajak mendatang akan tersedia sehingga aset pajak tangguhan tersebut dipulihkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama dan otoritas perpajakan yang sama.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Perusahaan menyajikan beban pajak final sebagai pos tersendiri. Perusahaan memiliki pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final yaitu penghasilan bunga.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Beban dan aset diakui setelah dikurangi dengan jumlah PPN, kecuali :

- Ketika PPN yang terjadi sehubungan dengan pembelian aset atau jasa tidak dapat diklaim kepada kantor pajak, dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai beban.
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk PPN.

j. Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Perusahaan mengakui liabilitas imbalan kerja jangka pendek (jika ada) ketika jasa diberikan oleh karyawan dan imbalan atas jasa tersebut akan dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah jasa tersebut diberikan.

Imbalan Pasca Kerja

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dengan metode projected-unit-credit, sesuai dengan PSAK No. 24 (Amandemen 2018). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan.

Perusahaan mengakui liabilitas atas program imbalan kerja karyawan sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 (“UU Ketenagakerjaan”) yang dihitung dengan metode projected-unit-credit.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti yang berupa keuntungan dan kerugian aktuarial diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Liabilitas Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi :

- Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 72 yang mensyaratkan pengakuan pendapatan harus memenuhi 5 langkah analisa sebagai berikut:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan merupakan janji-janji dalam kontrak untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik berbeda ke pelanggan;
3. Penetapan harga transaksi. Harga transaksi merupakan jumlah imbalan yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas diserahkannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
4. Alokasi harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan di kontrak.
5. Pengakuan pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan (ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut) pada suatu titik waktu atau periode waktu.

Harga transaksi merupakan angka yang ditagihkan kepada pelanggan setelah mengeluarkan pajak pertambahan nilai.

Kriteria spesifik berikut ini juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui.

Pendapatan Tol

Pendapatan tol dari hasil kerjasama integrasi pengoperasian jalan tol antara Perusahaan dengan operator bersama lainnya, diakui pada suatu titik waktu saat kendaraan melewati gerbang masuk tol, sebesar porsi bagi hasil Perusahaan untuk penjualan e-toll di seluruh jalan tol yang dioperasikan bersama.

Pendapatan Sewa

Pendapatan dari sewa lahan iklan dan sewa lahan untuk bangunan pihak lain diklasifikasikan sebagai sewa operasi dan diakui pada suatu periode waktu dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (accrual basis).

l. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi”. Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang terkait.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen Keuangan

1. Aset Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan kenaikan nilai aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lainnya.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 71, yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

- Pengakuan Awal

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual apakah semata dari pembayaran pokok dan bunga.

Aset keuangan diklasifikasikan dalam dua kategori sebagai berikut:
1. Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
2. Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan Perusahaan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Semua aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah dengan biaya-biaya transaksi, kecuali aset keuangan dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Pada tanggal 31 Maret 2020, aset keuangan mencakup kas dan setara kas, piutang lain - lain, dana yang ditetapkan penggunaannya, dan aset keuangan lainnya neto yang seluruhnya dikategorikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, jika tidak maka aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortiasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (*Effective Interest Rate*) ("EIR"), setelah dikurangi dengan penurunan nilai. Biaya perolehan yang diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi atas biaya akuisisi atau biaya yang merupakan bagian integral dari EIR tersebut. Amortisasi EIR dicatat dalam laporan laba rugi. Kerugian yang timbul dari penurunan nilai juga diakui pada laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain - lain dan dana yang ditetapkan penggunaannya pada laporan posisi keuangan.

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai wajar, dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen Keuangan (lanjutan)

1. Aset Keuangan (lanjutan)

- Penghentian pengakuan

  Aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (1) hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut telah berakhir; atau (2) Perusahaan telah mentransfer hak mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga dalam perjanjian "*pass-through*", dan salah satu diantara (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

- Penurunan nilai

  Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

  Dalam melakukan penilaian, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

  Perusahaan menerapkan metode sederhana untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang lain - lain.

2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK 71 diklasifikasikan sebagai berikut:
1. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi.
2. Liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dan, dalam hal liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, dikurangi dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Maret 2020, liabilitas keuangan Perusahaan mencakup utang usaha, utang kontraktor, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, beban akrual, utang obligasi, liabilitas pembebasan tanah dan liabilitas jangka panjang lainnya yang dikategorikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka panjang jika jatuh tempo melebihi 12 bulan dan sebagai liabilitas jangka pendek jika jatuh tempo yang tersisa kurang dari 12 bulan.

- Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

  Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

  Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Instrumen Keuangan (lanjutan)

2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

- Penghentian pengakuan

  Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

  Ketika liabilitas keuangan awal digantikan dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas persyaratan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan diakui dalam laba atau rugi.

3. Saling Hapus Dari Instrumen Keuangan

   Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

   Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga penawaran atau harga yang diminta pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan (*arm's length market transactions*), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lainnya.

   Risiko Penyesuaian Kredit

   Perusahaan menyesuaikan harga di pasar yang lebih dapat diobservasi untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak yang bertransaksi antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit Perusahaan terkait dengan instrumen ikut diperhitungkan.

n. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dimana ada kemungkinan besar bahwa untuk penyelesaian kewajiban tersebut diperlukan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik saat ini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi tersebut dibatalkan.

o. Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa didasarkan atas substansi dari perjanjian tersebut pada penetapan awal. Perjanjian tersebut ditelaah apakah pemenuhannya bergantung pada penggunaan suatu aset atau aset-aset tertentu secara spesifik atau perjanjian mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau aset-aset, walaupun hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit dalam perjanjian.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai lessor

Sewa di mana Perusahaan tidak mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Perusahaan sebagai lessee

Sewa pembiayaan yang mengalihkan kepada Perusahaan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, dikapitalisasi pada awal masa sewa sebesar nilai wajar dari aset sewa pembiayaan atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Pembayaran sewa dipisahkan antara beban keuangan dan pengurangan liabilitas sewa, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Beban keuangan dibebankan langsung pada laba rugi.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban usaha dalam laba rugi secara garis lurus selama masa sewa.

Mulai tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK 73 yang mensyaratkan pengakuan utang sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi'. Kebijakan ini berlaku untuk kontrak yang disepakati atau berubah, pada atau setelah 1 Januari 2020.

Pada tanggal permulaan kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perusahaan harus menilai apakah:
- Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan
- Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perusahaan memiliki hak ini ketika Perusahaan memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dengan:

1. Perusahaan memiliki hak untuk mengoperasikan aset; atau
2. Perusahaan telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal insepsi atau pada penilaian kembali atas kontrak yang mengandung sebuah komponen sewa, Perusahaan mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke masing-masing komponen sewa berdasarkan harga tersendiri relatif dari komponen sewa dan harga tersendiri agregat dari komponen nonsewa.

Pada tanggal permulaan sewa, Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.

Aset hak-guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Sewa (lanjutan)

Perusahaan sebagai lessor (lanjutan)

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi pembayaran tetap.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan sebagai beban keuangan dan pengurangan liabilitas sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa. Utang sewa yang terkait, dikurangi dengan beban keuangan, dimasukkan ke dalam "Utang sewa". Elemen bunga dari beban keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat bunga periodik yang konstan untuk saldo liabilitas yang tersisa pada setiap periode.

Sewa jangka pendek

Perusahaan memutuskan untuk tidak mengakui asset hak-guna dan utang sewa untuk sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang. Perusahaan mengakui pembayaran sewa atas sewa tersebut sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

p. Laba (Rugi) Per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar dan disetor penuh selama tahun yang bersangkutan, yang disesuaikan untuk mengasumsikan konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, Perusahaan tidak memiliki konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif sehingga Perusahaan tidak menyajikan laba (rugi) per saham dilusian.

q. Pengaturan Bersama

Perusahaan telah menerapkan PSAK No. 66 "Pengaturan Bersama". Berdasarkan PSAK ini, pengaturan bersama diklasifikasikan sebagai operasi bersama atau ventura bersama bergantung pada hak dan kewajiban kontraktual para pihak dalam pengaturan. Pada tanggal pelaporan, Perusahaan memiliki operasi bersama. Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Perusahaan memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Perusahaan termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama (operator bersama), atau pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama tersebut.

Sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, Perusahaan mengakui :

1. Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
2. Labilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama
3. Bagiannya atas pendapatan tol oleh operasi bersama; dan
4. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

Ketika Perusahaan melakukan transaksi dengan operasi bersama, dimana Perusahaan merupakan salah satu operator bersama, maka Perusahaan mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, tidak ada aset yang dimiliki bersama atau liabilitas yang terjadi bersama.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, tidak terdapat keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi dengan operator bersama.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING

Perusahaan membuat estimasi dan asumsi mengenai masa depan. Estimasi dan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan terus dievaluasi berdasarkan pengalaman historis dan faktor lainnya, termasuk ekspektasi dari peristiwa masa depan yang diyakini wajar. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Asumsi dan pertimbangan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas diungkapkan di bawah ini.

a. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Instrumen Keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, nilai perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 8.

Amortisasi Hak Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan melakukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol - jalan dan jembatan selama masa konsesi dengan menggunakan metode “Pola konsumsi jalan tol yang diakibatkan oleh lalu lintas” selama masa konsesi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Estimasi Umur Manfaat Aset Tetap dan Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud - hak pengusahaan jalan tol berdasarkan faktor-faktor seperti kondisi teknis, perkembangan teknologi di masa depan dan masa konsesi. Hasil operasi di masa depan akan dipengaruhi secara material atas perubahan estimasi ini yang diakibatkan oleh perubahan faktor yang telah disebutkan di atas.

Estimasi Volume Lalu Lintas

Dalam menentukan amortisasi hak pengusahaan jalan tol, manajemen Perusahaan memproyeksikan volume lalu lintas setelah tahun berjalan selama sisa tahun perjanjian konsesi. Volume lalu lintas diproyeksikan berdasarkan jumlah kendaraan dan disesuaikan dengan perbandingan terhadap volume lalu lintas aktual. Namun seiring berjalannya waktu, volume lalu lintas aktual dapat berbeda dengan estimasi tersebut, bergantung pada perubahan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tarif tol dan volume lalu lintas.

Manajemen Perusahaan melakukan penilaian secara periodik terhadap total proyeksi volume lalu lintas. Perusahaan akan menunjuk suatu konsultan lalu lintas profesional independen untuk melakukan studi lalu lintas profesional independen dan membuat penyesuaian yang tepat apabila terdapat perbedaan yang material antara proyeksi volume lalu lintas dan volume lalu lintas aktual.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Penentuan Nilai Wajar dari Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Ketika nilai wajar dari aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat dalam laporan posisi keuangan tidak dapat diambil dari pasar yang aktif, maka nilai wajarnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian, termasuk model discounted cash flow. Masukan untuk model tersebut dapat diambil dari pasar yang dapat diobservasi, tetapi apabila hal ini tidak dimungkinkan, sebuah tingkat pertimbangan disyaratkan dalam menetapkan nilai wajar.

Pertimbangan tersebut mencakup penggunaan masukan seperti risiko likuiditas, risiko kredit dan volatilitas. Perubahan dalam asumsi mengenai faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi nilai wajar dari instrumen keuangan yang dilaporkan. Rincian lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 30.

Provisi Pelapisan Jalan Tol

Biaya pelapisan ini akan dicadangkan secara berkala berdasarkan estimasi seiring dengan penggunaan jalan tol oleh pelanggan. Provisi diukur dengan nilai kini atas estimasi manajemen terhadap pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas kini pada tanggal pelaporan.

Imbalan Kerja

Penentuan kewajiban Perusahaan untuk menyediakan imbalan kerja bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung nilai-nilai tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan oleh Perusahaan diakui dalam penghasilan (rugi) komprehensif lain pada saat terjadinya. Sementara Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan atas asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material atas estimasi liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 20.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan liabilitas atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Rincian atas sifat dan nilai tercatat pajak penghasilan diungkapkan pada Catatan 2i.

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga semua bagian dari aset pajak tangguhan dapat dimanfaatkan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa yang akan datang serta strategi perencanaan pajak masa depan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

a. Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang Penting (lanjutan)

Sewa

Penentuan apakah suatu perjanjian mengandung unsur sewa membutuhkan pertimbangan yang cermat untuk menilai apakah perjanjian tersebut memberikan hak untuk mendapatkan secara subtansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian dan hak untuk mengarahkan penggunaan asset identifikasian, bahkan jika hak tersebut tidak dijabarkan secara eksplisit di perjanjian.

Perusahaan mempunyai beberapa perjanjian sewa di mana Perusahaan bertindak sebagai penyewa untuk beberapa asset tertentu. Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat risiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan dari aset sewaan yang dialihkan kepada berdasarkan PSAK 73, yang mensyaratkan Perusahaan untuk membuat pertimbangan dan estimasi dari pengalihan risiko dan manfaat terkait atas kepemilikan aset sewaan.

Karena Perusahaan tidak dapat dengan mudah menentukan suku bunga implisit, manajemen menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perusahaan sebagai tingkat diskonto. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, yang banyak di antaranya memerlukan pertimbangan untuk dapat secara andal mengukur penyesuaian yang diperlukan untuk sampai pada tingkat diskonto akhir. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perusahaan mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporat Perusahaan, jangka waktu sewa, lingkungan ekonomi, waktu di mana sewa dimasukkan, dan mata uang di mana pembayaran sewa ditentukan.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang menimbulkan insentif ekonomi untuk menggunakan opsi perpanjangan. Opsi perpanjangan hanya termasuk dalam jangka waktu sewa jika cukup pasti akan di perpanjang.

Cadangan penurunan nilai piutang

Tingkat provisi yang spesifik dievaluasi oleh manajemen dengan dasar faktor-faktor yang memengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut. Dalam kasus ini, Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan kondisi terbaik yang tersedia meliputi tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan Perusahaan dengan pelanggan dan status kredit pelanggan berdasarkan laporan dari pihak ketiga dan faktor-faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat pencadangan spesifik untuk pelanggan terhadap jumlah jatuh tempo untuk mengurangi piutang Perusahaan menjadi jumlah yang diharapkan tertagih.

b. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Pengelompokan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan pengelompokan aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan bila definisi yang ditetapkan dalam PSAK 55 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti yang diungkapkan pada Catatan 29.

Pengakuan dan Pengukuran Aset Takberwujud - Hak Pengusahaan Jalan Tol

Perusahaan mengakui aset takberwujud sejauh Perusahaan memiliki hak (lisensi) untuk membebankan pengguna jasa publik. Suatu hak untuk membebankan pengguna jasa publik bukan merupakan hak tanpa syarat untuk menerima kas karena jumlahnya bergantung pada sejauh mana publik menggunakan jasa. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemberi konsesi kepada Perusahaan akan ditentukan dengan mengacu pada syarat kontrak dan, jika ada, hukum kontrak yang relevan.

3. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Pertimbangan Penting dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

Perjanjian Konsesi Jasa

ISAK 16 menjelaskan pendekatan untuk membukukan perjanjian konsesi jasa akibat dari penyediaan jasa kepada publik. ISAK 16 mengatur bahwa operator (pihak penerima konsesi jasa) tidak membukukan infrastruktur sebagai aset tetap, namun diakui sebagai aset keuangan dan/atau aset takberwujud.

BPJT memberikan hak, kewajiban dan keistimewaan kepada Perusahaan termasuk kewenangan dalam pendanaan, desain, konstruksi, operasi dan pemeliharaan jalan tol (Catatan 2f). Pada akhir masa konsesi jasa, Perusahaan harus menyerahkan jalan tol kepada BPJT tanpa biaya, dalam keadaan beroperasional dan kondisi yang baik, termasuk setiap dan semua tanah yang diperlukan, pekerjaan, fasilitas jalan dan peralatan tol yang secara langsung berkaitan dan berhubungan dengan pengoperasian fasilitas jalan tol. Perusahaan berpendapat bahwa PPJT memenuhi kriteria sebagai model aset takberwujud, dimana aset konsesi diakui sebagai aset takberwujud sesuai dengan PSAK 19, "Aset Takberwujud".

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan setara kas terdiri dari :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Kas		
Kas Kecil	30.250	30.250
Kas Pengembalian	5.325	5.328
Total Kas	35.575	35.578
Bank		
Pihak berelasi (Catatan 28)	33.288.780	18.543.975
Pihak ketiga :		
PT Bank Permata Tbk	1.601.437	1.581.815
PT Bank Central Asia Tbk	11.950.937	8.257.650
PT Bank Mega Tbk	81.513	79.518
Total Bank	46.922.667	28.462.958
Total kas dan bank	46.958.242	28.498.536
Deposito berjangka		
Pihak berelasi (Catatan 28)	83.000.000	86.000.000
Pihak ketiga :		
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional	5.000.000	2.000.000
PT Bank Jabar Banten	29.000.000	46.500.000
Total deposito berjangka	117.000.000	134.500.000
Total kas dan setara kas	**163.958.242**	**162.998.536**

Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Rupiah	5,50% - 8,25%	5,50% - 8,25%

Kas pengembalian merupakan uang tunai dan kartu e-toll yang tersedia di gerbang tol untuk membiayai pengguna jalan tol dalam keadaan tertentu.

Semua kas dan setara kas adalah dalam mata uang Rupiah.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini terutama terdiri dari pendapatan yang akan diterima dari bagi hasil tol.

Rincian piutang lain-lain adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi (Catatan 28)	4.923.106	6.386.636
Pihak ketiga :		
PT Bank Central Asia Tbk	50.150	328.267
PT Jalan Lingkar Baratsatu	1.303.640	1.630.711
Piutang bunga deposito	1.271.373	1.336.632
Piutang Lainnya	1.138.970	2.368.531
Sub-total	8.687.240	12.050.777
Dikurangi :		
Penyisihan penurunan nilai piutang pihak berelasi	(469.000)	(469.000)
Sub-total	(469.000)	(469.000)
Total piutang lain-lain - neto	**8.218.240**	**11.581.777**

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Saldo awal tahun	469.000	469.000
Penyisihan selama tahun berjalan	-	-
Saldo akhir tahun	**469.000**	**469.000**

Penyisihan kerugian penurunan nilai merupakan penurunan nilai secara individual. Penyisihan piutang lain-lain pihak berelasi dibentuk karena terdapat ketidakpastian signifikan terhadap kolektibilitas piutang lain-lain pihak berelasi tersebut. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan tersebut di atas adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas penurunan nilai piutang lain-lain pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019.

6. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari uang muka kontrakor (bagian lancar) dan biaya dibayar di muka yang dibayar oleh Perusahaan sehubungan dengan biaya bahan bakar, perlengkapan kantor, kegiatan sosial, asuransi dibayar di muka, dan sebagainya.

Akun ini terdiri dari :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Uang muka operasional	100.656	-
Uang Muka Pihak Ke-3	119.682	119.682
Asuransi dan biaya dibayar di muka	368.785	-
Uang Muka Lainnya	98.745	-
Total	**687.869**	**119.682**

7. DANA DITETAPKAN PENGGUNAANNYA

Pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019, akun ini merupakan penyisihan dana cadangan pembayaran pokok obligasi yang ditempatkan di PT Bank Mega Tbk masing-masing sebesar Rp325.438.500 dan Rp309.438.500 untuk seluruh seri obligasi, yang disajikan sebagai bagian aset tidak lancar.

8. ASET TETAP - NETO

Rincian aset tetap adalah sebagai berikut :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020				
	Saldo Awal	**Penambahan**	**Pengurangan**	**Reklasifikasi**	**Saldo Akhir**
Harga Perolehan					
Aset Tetap Pemilikan Langsung					
Bangunan	20.323.904	-	-	-	20.323.904
Partisi dan perlengkapan kantor	2.136.924	-	-	-	2.136.924
Perlengkapan lalu lintas	25.084.060	442.518	-	-	25.526.579
Subtotal	**47.544.888**	**442.518**	**-**	**-**	**47.987.407**
Aset Hak Guna					
Bangunan	-	151.345	-	-	151.345
Peralatan Operasi dan Kantor	33.515	-	-	-	33.515
Kendaraan	800.047	-	-	-	800.047
Subtotal	**833.562**	**151.345**	**-**	**-**	**984.906**
Total Harga Perolehan	**48.378.450**	**593.863**	**-**	**-**	**48.972.313**
Akumulasi Penyusutan					
Aset Tetap Pemilikan Langsung					
Bangunan	3.498.858	635.747	-	-	4.134.605
Partisi dan perlengkapan kantor	1.704.431	309.697	-	-	2.014.128
Perlengkapan lalu lintas	11.226.889	2.039.939	-	-	13.266.828
Subtotal	**16.430.178**	**2.985.383**	**-**	**-**	**19.415.561**
Aset Hak Guna					
Bangunan	-	24.215	-	-	24.215
Peralatan Operasi dan Kantor	-	12.568	-	-	12.568
Kendaraan	-	300.018	-	-	300.018
Subtotal	**-**	**336.801**	**-**	**-**	**336.801**
Total Akumulasi Penyusutan	**16.430.178**	**3.322.184**	**-**	**-**	**19.752.362**
Nilai Tercatat - Neto	**31.948.272**				**29.219.951**

Dampak dari penerapan dini PSAK 73 terhadaprincian kelas aset adalah sebagai berikut:

	Biaya Perolehan			
	Penyesuaian PSAK 73			
	01/01/2020	**Penambahan**	**Reklasifikasi**	**Saldo awal**
Aset Hak Guna				
Bangunan	-		-	-
Peralatan Operasi dan Kantor	-	33.515	-	33.515
Kendaraan	-	800.047	-	800.047
Total	**-**	**833.562**	**-**	**833.562**
	Akumulasi penyusutan			
	Penyesuaian PSAK 73			
Aset Hak Guna				
Bangunan	-	-	-	-
Peralatan Operasi dan Kantor	-	-	-	-
Kendaraan	-	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**	**-**

8. ASET TETAP - NETO (lanjutan)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019				
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan					
Bangunan	19.241.797	1.082.107	-	-	20.323.904
Partisi dan perlengkapan kantor	1.987.144	149.780	-	-	2.136.924
Perlengkapan lalu lintas	20.760.848	2.740.451	-	1.582.761	25.084.060
Aset tetap dalam konstruksi	1.582.761	-	-	(1.582.761)	-
Total Harga Perolehan	**43.572.550**	**3.972.338**	**-**	**-**	**47.544.888**
Akumulasi Penyusutan					
Bangunan	2.314.200	1.184.658	-	-	3.498.858
Partisi dan perlengkapan kantor	1.515.095	189.336	-	-	1.704.431
Perlengkapan lalu lintas	6.800.955	4.425.934	-	-	11.226.889
Total Akumulasi Penyusutan	**10.630.250**	**5.799.928**	**-**	**-**	**16.430.178**
Nilai Tercatat - Neto	**32.942.300**				**31.114.710**

Perusahaan telah mengasuransikan Sarana dan Prasarana Jalan Tol, dan Jembatan/*Overpass* terhadap risiko *Property All Risk* (PAR), *Earthquake and Civil Engineering Completed Risks (CECR)* kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 447.794 untuk periode pertanggungan dari tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 15 Februasi 2021. Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa nilai pertanggungannya cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

9. HAK PENGUSAHAAN JALAN TOL - NETO

Aset hak pengusahaan jalan tol merupakan hak konsesi dari Pemerintah Republik Indonesia berupa pengusahaan jalan tol yang diberikan kepada Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Reklasifikasi	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk)	2.024.012.101	-	-	2.024.012.101
Aset tetap dalam konstruksi	-	19.008.850	-	19.008.850
Sub-total	**2.024.012.101**	**19.008.850**	**-**	**2.043.020.951**
Akumulasi Amortisasi				
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk)	388.324.945	20.016.852		408.341.797
Sub-total	**388.324.945**	**20.016.852**	**-**	**408.341.797**
Nilai Buku - Neto	**1.635.687.156**			**1.634.679.154**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk)	2.018.898.024	5.114.077	-	2.024.012.101
Sub-total	**2.018.898.024**	**5.114.077**	**-**	**2.024.012.101**
Akumulasi Amortisasi				
Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk)	329.149.027	59.175.918	-	388.324.945
Sub-total	**329.149.027**	**59.175.918**	**-**	**388.324.945**
Nilai Buku - Neto	**1.689.748.997**			**1.635.687.156**

10. ASET TAKBERWUJUD LAINNYA

Jumlah dari aset takberwujud lainnya ini terdiri dari :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Perangkat Lunak		
Saldo Awal	1.745.372	1.745.372
Akumulasi Amortisasi	(387.860)	(96.965)
Total	**1.357.512**	**1.648.407**

11. UANG MUKA KONTRAKTOR

Akun ini terdiri dari pembayaran uang muka terhadap kontraktor untuk pekerjaan SFO (Scraping Filling Overlay) dan Rekontruksi Jalan Tol.

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Uang Muka Kontraktor		
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	1.433.877	-
Total	**1.433.877**	**-**

12. UTANG USAHA

Akun ini merupakan utang kepada pemasok pihak ketiga untuk pengadaan barang cetakan, alat tulis kantor, obat-obatan dan pakaian dinas serta utang usaha atas jasa pemeliharaan dan pembersihan jalan tol.

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Pihak ketiga	1.123.151	660.845
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	-
Total utang usaha	**1.123.151**	**660.845**

13. UTANG KONTRAKTOR DAN KONSULTAN

Akun ini merupakan utang kepada kontraktor, dan konsultan sehubungan dengan pengadaan fasilitas tol dan bangunan lain dengan rincian sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 28)	-	-
Pihak Ketiga :		
PT Purnajasa Bimapratama	664.912	664.912
PT Tata Guna	552.745	552.745
PT Multhi Phi Beta	215.534	215.534
PT Seecon	143.479	143.479
PT Duta Anugerah Mandiri	108.293	108.293
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 juta)	92.900	92.900
Total utang kontraktor dan konsultan	**1.777.862**	**1.777.862**

14. UTANG LAIN-LAIN

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Uang titipan		
Pihak berelasi (Catatan 28)	8.372.920	9.437.287
Pihak ketiga	1.496.965	1.659.145
Pendapatan iklan diterima di muka	51.173	126.980
Hutang Denda	162.898	162.898
Total utang lain-lain	**10.083.955**	**11.386.310**

14. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Uang titipan merupakan pendapatan tol E-Toll Card yang belum dibayarkan kepada PT Jalantol Lingkarluar Jakarta, PT Jasa Marga Tollroad Operator, PT Jalan Lingkar Baratsatu, dan PT Hutama Karya (Persero) atas kendaraan yang melewati ruas tol Perusahaan sehubungan dengan perjanjian kerjasama operasi terpadu (Catatan 31d).

Perusahaan menandatangani beberapa perjanjian sewa yang berkaitan dengan sewa lahan, gedung, kendaraan, dan peralatan lainnya. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset hak-guna tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 menyajikan saldo-saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	2020	2019
Aset Hak Guna$^{(a)}$		
Kendaraan Bermotor	650.038	-
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	145.291	-
Peralatan Operasi dan Kantor	27.231	-
Total	**822.560**	**-**

$^{(a)}$ *Disajikan sebagai "Aset tetap" dalam laporan posisi keuangan*

	31 Maret 2020	31 Desember 2019
Utang Sewa	601.165	-
Total	**601.165**	**-**

Penambahan aset hak guna selama tahun yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp 984.906

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

	2020	2019
Depresiasi atas aset hak guna		
Kendaraan Bermotor	300.018	-
Gedung Kantor dan Bangunan Lain	24.215	-
Peralatan Operasi dan Kantor	12.568	-
Beban Bunga	27.501	-
Beban sewa jangka pendek		
dan aset bernilai rendah	338.637	-
Total	**702.939**	**-**

Pergerakan pada utang sewa yang timbul dari aktivitas pendanaan di 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Pada awal tahun	833.562	-
Penambahan utang sewa	151.345	-
Beban bunga utang sewa	27.501	-
Pembayaran utang sewa	(411.243)	-
	601.165	**-**

15. PERPAJAKAN

a. Utang pajak

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Pajak penghasilan :		
Pasal 4 (2)	142.785	5.360
Pasal 21	74.478	121.824
Pasal 23	46.701	72.794
PPN Belum Disetor	890	1.040
Total utang pajak	**264.854**	**201.017**

b. Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dan rugi fiskal Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	(7.888.630)	49.396.988
Beda temporer :		
Amortisasi aset takberwujud	(28.548.874)	(43.228.590)
Penyusutan aset tetap	(2.646.946)	(15.204)
Imbalan kerja	489.398	464.314
Biaya provisi untuk pelapisan jalan tol	(12.372.056)	13.736.950
Sewa	25.665	-

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Beda tetap :		
Beban umum dan administrasi	649.879	2.029.717
Beban bunga	19.157.910	31.625.045
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(13.025.229)	(22.040.660)
Taksiran (rugi) laba fiskal	(44.158.883)	31.968.559
Rugi fiskal tahun 2014	-	(31.968.559)
Rugi fiskal tahun 2015	(136.549.796)	(136.549.796)
Rugi fiskal tahun 2017	(35.520.143)	(35.520.143)
Rugi fiskal tahun 2018	(41.537.456)	(41.537.456)
Total akumulasi rugi fiskal	**(257.766.279)**	**(213.607.395)**

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, rugi fiskal dapat dikompensasikan selama periode 5 tahun dari setiap tahun kerugian fiskal tersebut terjadi. Perusahaan menyerahkan Surat Pemberitahuan dengan sistem self-assessment. Otoritas perpajakan dapat memeriksa Perusahaan dalam 5 tahun dari tanggal pajak tersebut terhutang.

Taksiran (rugi) laba fiskal hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 menjadi dasar penyusunan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun-tahun tersebut.

15. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut :

	1 Januari 2020	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Diakui dipenghasilan komprehensif lain	30 Juni 2020
Amortisasi HPJT	(65.772.669)	1.611.968	-	(64.160.701)
Penyusutan aset tetap	(81.630)	(572.532)	-	(654.163)
Imbalan kerja	911.030	(1.656)	-	909.374
Kompensasi rugi fiskal	23.607.169	(2.832.860)	-	20.774.309
Provisi pelapisan jalan tol	6.615.028	(3.515.656)	-	3.099.373
Sewa	-	5.646	-	5.646
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto	**(34.721.071)**	**(5.305.090)**	**-**	**(40.026.162)**

	1 Januari 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi	Diakui dipenghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Amortisasi HPJT	(54.841.881)	(10.930.788)	-	(65.772.669)
Penyusutan aset tetap	(449.356)	367.726	-	(81.630)
Imbalan kerja	629.074	116.078	165.878	911.030
Kompensasi rugi fiskal	24.595.014	(987.845)	-	23.607.169
Provisi pelapisan jalan tol	3.180.790	3.434.239	-	6.615.028
Aset (liabilitas) pajak tangguhan - neto	**(26.886.359)**	**(8.000.590)**	**165.878**	**(34.721.071)**

d. Rekonsiliasi antara (beban) manfaat pajak penghasilan yang tercermin di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada rugi sebelum pajak penghasilan Perusahaan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
(Rugi) laba sebelum pajak penghasilan	**(7.888.630)**	**49.396.988**
Beban pajak atas laba dengan tarif pajak yang berlaku (22%)	-	(12.349.248)
Efek pajak penghasilan pada beda tetap :		
Beban pajak yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	(4.357.714)	(8.413.692)
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	2.865.550	5.510.166
Penyesuaian pajak tangguhan atas estimasi rugi fiskal yang dapat dipulihkan	(3.812.927)	7.252.184
Beban pajak penghasilan	**(5.305.090)**	**(8.000.590)**

16. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 28)	21.966.327	2.573.906
Akrual Beban Bunga Utang Obligasi	18.467.335	18.467.335
Akrual Hutang Biaya Bonus Karyawan	4.870.272	5.076.883
Akrual Pajak Bumi dan Bangunan	10.462.741	-
Lain-lain	5.488.250	4.995.350
Total beban akrual	**61.254.925**	**31.113.473**

17. UTANG RETENSI

Utang retensi merupakan utang atas pekerjaan konstruksi pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Jakarta (JORR) W2 Utara dan bangunan pelengkap gedung kantor. Retensi ditahan Perusahaan sampai selama 1 tahun setelah pekerjaan konstruksi selesai dan diserahterimakan. Rincian utang retensi adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Pihak berelasi (Catatan 27)	3.562.528	1.426.481
Pihak ketiga :		
PT Mahardika Jaya Utama	191.463	191.463
PT Module Intracs	17.328	193.495
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp100 juta)	107.492	344.778
Total utang retensi	**3.878.812**	**2.156.217**

18. UTANG OBLIGASI

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Obligasi Marga Lingkar Jakarta		
Seri A	200.000.000	200.000.000
Seri B	217.000.000	217.000.000
Seri C	299.000.000	299.000.000
Seri D	320.000.000	320.000.000
Seri E	464.000.000	464.000.000
Total	**1.500.000.000**	**1.500.000.000**
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(4.354.716)	(4.841.581)
Total Utang Obligasi	**1.495.645.284**	**1.495.158.419**
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-
Total Utang Obligasi	**1.495.645.284**	**1.495.158.419**

Pada tanggal 31 Oktober 2017, Perusahaan mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penerbitan Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 ("Obligasi") dengan 5 (lima) seri yaitu :

a) Seri A senilai Rp200.000.000.000 dengan suku bunga 7,45% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 8 November 2020

b) Seri B senilai Rp217.000.000.000 dengan suku bunga 7,75% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 8 November 2022

c) Seri C senilai Rp299.000.000.000 dengan suku bunga 8,30% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 8 November 2024

d) Seri D senilai Rp320.000.000.000 dengan suku bunga 8,70% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 8 November 2027

e) Seri E senilai Rp464.000.000.000 dengan suku bunga 8,85% per tahun dan akan jatuh tempo tanggal 8 November 2029

Total dana yang diterima Perusahaan pada tanggal 8 November 2017 dari hasil penerbitan Obligasi adalah sebesar Rp1.500.000.000.000. Sesuai dengan perjanjian dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dan prospektus utang obligasi MLJ, sekitar 90% dari dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan seluruh kredit investasi dan sekitar 8% untuk penyisihan dana cadangan pembayaran bunga sebesar 12 (dua belas) bulan bunga untuk seluruh seri obligasi yang tersedia paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal emisi, dan sisanya untuk modal kerja, temasuk namun tidak terbatas kepada biaya layanan transaksi, biaya layanan lalu lintas dan biaya layanan konstruksi.

18. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Perusahaan juga diwajibkan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan selama periode utang obligasi sebagai berikut :

a) Interest Coverage Ratio (ICR) (rasio cakupan bunga) lebih atau sama dengan 1,5 kali,
b) Debt to Equity Ratio (DER) (rasio utang) kurang atau sama dengan 4 kali.

Perusahaan juga akan dianggap wan prestasi terhadap kewajibannya sehubungan dengan utang obligasinya apabila Perusahaan membuat utang baru, kecuali untuk menambah keperluan modal kerja Perusahaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional dan/atau dana cadangan pelunasan pokok Obligasi dan/atau dana cadangan pemeliharaan atau apabila Perusahaan mengeluarkan obligasi atau instrumen utang lain yang sejenis yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi.

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

19. PROVISI PELAPISAN JALAN TOL

Jumlah dari provisi pelapisan jalan tol ini terdiri dari :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	26.460.108	12.723.159
Penambahan	10.758.635	18.335.861
Realisasi	(23.130.691)	(4.598.911)
Saldo Akhir	**14.088.052**	**26.460.108**
Bagian Jangka Pendek	5.108.053	21.798.947
Bagian Jangka Panjang	8.980.000	4.661.161
Total	**14.088.052**	**26.460.108**

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

Perusahaan telah menghitung liabilitasnya sehubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tidak ada pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan program imbalan kerja tersebut.

Asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Usia pensiun normal	56 tahun	56 tahun
Tingkat kenaikan gaji per tahun	6%	6%
Tingkat diskonto per tahun	8,75%	8,75%
Tabel mortalita	TM III	TM III
Tingkat cacat tetap per tahun	0,02%	0,02%
Tingkat pengunduran diri sukarela	1% pada usia 40 tahun dan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun	1% pada usia 40 tahun dan berkurang secara linear sampai 0% pada usia 55 tahun

Estimasi liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2019 adalah berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan masing-masing oleh PT Padma Radya Aktuaria, aktuaria independen.

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Rincian beban yang diakui adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Kerugian dari penyelesaian	-	3.276.678
Biaya bunga	-	93.063
Biaya jasa kini	-	727.836
Total beban yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	**-**	**4.097.577**

Mutasi keuntungan (kerugian) aktuaria yang diakui dipenghasilan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Saldo awal tahun	323.190	820.825
Keuntungan (kerugian) aktuaria	-	(663.513)
Efek pajak - (beban) manfaat pajak tangguhan	-	165.878
Penghasilan komprehensif lain di akhir tahun, bersih	**323.190**	**323.190**

Mutasi liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Saldo awal	3.644.122	2.516.295
Beban yang diakui	489.398	4.097.578
Pembayaran pesangon	-	(3.633.265)
Kerugian (keuntungan) aktuaria	-	663.513
Saldo akhir tahun	**4.133.519**	**3.644.122**

Jadwal jatuh tempo pembayaran dari liabilitas imbalan imbalan pasca kerja adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Kurang dari 1 tahun	-	-
1 sampai 5 tahun	32.489	32.489
5 sampai 10 tahun	381.451	381.451
Lebih dari 10 tahun	3.719.579	3.230.181
Total	**4.133.519**	**3.644.122**

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Maret 2020 adalah sebagai berikut :

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti

Asumsi Tingkat Diskonto
- \- 1.00%
- \+ 1.00%

Asumsi Tingkat Diskonto
- \- 1.00%
- \+ 1.00%

20. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	**3.644.122**
Asumsi Tingkat Diskonto	
- 1.00%	2.864.049.163
+ 1.00%	2.220.924.925
Asumsi Tingkat Diskonto	
- 1.00%	2.202.379.199
+ 1.00%	2.881.599.314

21. MODAL SAHAM

Rincian kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Kepemilikan Lembar Saham	Persentase Kepemilikan	Total Rp
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	426.222.550	65%	426.222.550
PT Jakarta Marga Jaya	229.504.450	35%	229.504.450
Total	**655.727.000**	**100%**	**655.727.000**

22. PENDAPATAN TOL DAN USAHA LAINNYA

Merupakan pendapatan tol atas pengoperasian ruas Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara (Ulujami - Kebon Jeruk).

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Pendapatan tol	114.441.767	148.870.363
Total	**114.441.767**	**148.870.363**

Berdasarkan Kepmen PU No. 710/KPTS/M/2018 tanggal 14 September 2018 yang berlaku sejak tanggal 29 September 2018 untuk ruas JORR (W.S.E), tarif terjauh untuk ruas tersebut adalah sebagai berikut :

Ruas	Golongan				
	I	II	III	IV	V
JORR W2 Utara	**15.000**	**22.500**	**22.500**	**30.000**	**30.000**

Pendapatan Usaha Lainnya

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari pendapatan sewa lahan dan iklan, dan lainnya sebesar Rp 778.911 dan Rp 116.089 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 dan 31 Desember 2019.

23. BEBAN TOL

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Gaji dan Tunjangan	6.882.846	9.560.139
Penyusutan dan Amortisasi	20.016.852	29.314.453
Bahan Bakar, dan Listrik	1.557.199	1.797.815
Pemeiharaan	5.015.488	4.721.736
Sewa Kendaraan	355.850	775.170
Provisi Pelapisan Ulang	10.758.635	11.255.396
Lainnya	6.373.983	4.583.293
Total	**50.960.854**	**62.008.001**

24. PENGHASILAN KEUANGAN

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Penghasilan bunga deposito	15.711.157	13.045.371
Beban pajak deposito	(3.142.231)	(2.609.074)
Penghasilan jasa giro	250.750	395.136
Beban pajak giro	(50.150)	(79.027)
Total	**12.769.526**	**10.752.405**

25. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Gaji dan Tunjangan	5.156.463	5.163.173
Penyusutan dan Amortisasi	3.613.079	782.227
Bahan Bakar, dan Listrik	118.055	98.807
Pemeiharaan	184.736	234.967
Sewa Kendaraan	63.190	416.452
Pajak Iuran dan Retribusi	10.462.741	8.295.064
Jasa Profesional	314.926	155.463
Aksi Korporasi Emiten	265.857	304.387
Lainnya	962.075	1.331.524
Total	**21.141.123**	**16.782.063**

26. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Penghasilan Lain-Lain	203.903	328.611
Beban Lain-Lain	(774.644)	(160.524)
Total	**(570.741)**	**168.087**

27. BEBAN KEUANGAN - NETO

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut :

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Utang obligasi		
Utang Obligasi Seri A	7.595.232	7.593.406
Utang Obligasi Seri B	8.503.330	8.502.474
Utang Obligasi Seri C	12.501.564	12.501.219
Utang Obligasi Seri D	13.989.737	13.989.843
Utang Obligasi Seri E	20.616.253	20.616.499
Total	**63.206.116**	**63.203.441**

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Saldo akun dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut :

			Persentasi Terhadap Total Aset	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Aset - Kas dan setara kas				
Bank	**33.288.780**	**18.543.975**	**1,54%**	**0,86%**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	30.019.645	13.308.069	1,39%	0,62%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.196.814	2.465.819	0,10%	0,11%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.072.320	2.770.086	0,05%	0,13%
Deposito	**83.000.000**	**86.000.000**	**3,83%**	**4,00%**
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.000.000	10.000.000	0,46%	0,46%
PT Bank Mandiri Taspen	73.000.000	76.000.000	3,37%	3,53%
Total kas dan setara kas	**116.288.780**	**104.543.975**	**5,37%**	**4,86%**

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Saldo akun dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan) :

			Persentasi Terhadap Total Aset	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Piutang lain - lain				
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	1.915.357	1.846.638	0,09%	0,09%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	503.835	307.035	0,02%	0,01%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	190.090	0,00%	0,01%
PT Jasamarga (Persero) Tbk	347.330	173.669	0,02%	0,01%
PT Hutama Karya (Persero)	873.214	2.040.034	0,04%	0,09%
PT Jasa Marga Tollroad Operator	1.268.844	1.829.170	0,06%	0,08%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	14.525	-	0,00%	0,00%
Total piutang lain - lain	**4.923.106**	**6.386.636**	**0,23%**	**0,30%**

			Persentasi Terhadap Total Liabilitas	
	30 Juni 2020	31 Desember 2019	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Liabilitas				
Hutang Afiliasi - KSO				
PT Jasa Marga Tollroad Operator	1.520.525	-	0,09%	0,00%
Total utang kontraktor dan konsultan	**1.520.525**	**-**	**0,00%**	**0,00%**
Uang titipan				
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	2.264.264	2.688.489	0,14%	0,16%
PT Jasamarga (Persero) Tbk	4.196	4.196	0,00%	0,00%
PT Hutama Karya (Persero)	3.248.909	4.113.685	0,20%	0,25%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	-	0,00%	0,00%
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	151.122	151.122	0,01%	0,01%
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	792.470	0,00%	0,05%
PT Jasa Marga Tollroad Operator	1.183.904	1.687.325	0,07%	0,10%
Total uang titipan	**6.852.394**	**9.437.287**	**0,42%**	**0,58%**
Uang retensi				
PT Jaya Kontruksi Manggala Pratam Tbk	2.977.923	1.426.481	0,18%	0,09%
PT Jasamarga Tollroad Maintenance	584.605	-	0,04%	0,00%
Total uang retensi	**3.562.528**	**1.426.481**	**0,22%**	**0,09%**
Beban Akrual				
PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama	5.538.489	-	0,34%	0,00%
PT Jasa Marga Tollroad Operator	1.793.920	2.573.906	0,11%	0,16%
PT Jasa Marga Tollroad Maintenance	14.633.918	-	0,90%	0,00%
Total Beban Akrual	**21.966.327**	**2.573.906**	**1,35%**	**0,16%**

28. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

a. Saldo akun dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan) :

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak berelasi sebagai berikut :

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Pemegang Saham	Piutang lain-lain, uang titipan
PT Hutama Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang lain-lain, uang titipan
PT Jalantol Lingkarluar Jakarta	Entitas sepengendali	Piutang lain-lain, uang titipan
Badan Layanan Umum Badan Pengatur Jalan Tol (BLU BPJT)	Merupakan Badan/Instansi yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Liabilitas pembebasan tanah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan giro, piutang lain-lain, uang titipan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan giro, piutang lain-lain, uang titipan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan giro, piutang lain-lain, uang titipan
PT Jasa Layanan Pemeliharaan	Entitas sepengendali	Utang retensi
PT Jasa Marga Tollroad Operator	Entitas sepengendali	Piutang lain-lain, uang titipan
PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama Tbk	Entitas sepengendali	Utang retensi

29. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel berikut menyajikan taksiran nilai wajar, yang juga sama dengan nilai tercatat (kecuali utang obligasi), dari instrumen keuangan Perusahaan yang dicatat di laporan posisi keuangan :

	30 Juni 2020	31 Desember 2019
Aset Keuangan		
Aset Keuangan Lancar		
Kas dan setara kas	163.958.242	162.998.536
Piutang lain-lain	8.218.240	11.581.777
Dana ditetapkan penggunaannya	325.438.500	309.438.500
Total Aset Keuangan	**497.614.982**	**484.018.813**
Liabilitas Keuangan		
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek		
Utang usaha	1.123.151	660.845
Utang kontraktor dan konsultan	1.777.862	1.777.862
Beban akrual	61.254.925	31.113.473
Utang retensi	3.878.812	2.156.217
Utang lain-lain	10.685.119	11.386.310
Total Liabilitas Keuangan Jangka Pendek	**78.719.869**	**47.094.707**
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang		
Utang obligasi	1.295.749.819	1.295.428.875
Total Liabilitas Keuangan Jangka Panjang	**1.295.749.819**	**1.295.428.875**
Total Liabilitas Keuangan	**1.374.469.688**	**1.342.523.582**

29. ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai tercatat utang obligasi adalah Rp1.431.591.851.000 dengan taksiran nilai wajar sebesar Rp1.530.655.950.000.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan yang mana dapat digunakan untuk memperkirakan nilai tersebut:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan jangka pendek diasumsikan sama dengan niai tercatatnya karena akan jatuh tempo dalam waktu singkat.

Liabilitas keuangan jangka panjang

Nilai wajar liabilitas keuangan jangka panjang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif berdasarkan tingkat suku bunga terakhir yang berlaku di pasar pada tanggal laporan posisi keuangan.

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga mengambang yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN

Kebijakan Manajemen Risiko

Risiko keuangan utama yang dihadapi Perusahaan adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga. Perhatian atas pengelolaan risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Perusahaan menghadapi risiko keuangan yaitu risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko suku bunga, dan mendefinisikan risiko-risiko sebagai berikut :

- Risiko kredit : kemungkinan bahwa debitur tidak membayar semua atau sebagian pinjaman atau tidak membayar secara tepat waktu dan akan menyebabkan kerugian Perusahaan.
- Risiko likuiditas : Perusahaan menetapkan risiko kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas yang terkait dengan liabilitas keuangan.
- Risiko suku bunga : risiko dimana arus kas masa datang suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar.

Dalam rangka untuk mengelola risiko tersebut secara efektif, Direksi Perusahaan telah menyetujui beberapa strategi untuk pengelolaan risiko keuangan, yang sejalan dengan tujuan Perusahaan. Pedoman ini menetapkan tujuan dan tindakan yang harus diambil dalam rangka mengelola risiko keuangan yang dihadapi Perusahaan.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- Meminimalkan dampak dari perubahan mata uang dan risiko pasar atas semua jenis transaksi; dan
- Semua kegiatan manajemen risiko keuangan dilakukan secara bijaksana, konsisten, dan mengikuti praktik pasar terbaik.

Risiko Kredit

Perusahaan mengelola risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk masing-masing pelanggan dan lebih selektif dalam pemilihan bank, yaitu hanya bank-bank ternama dan yang berpredikat baik yang dipilih.

Tabel di bawah ini menunjukkan risiko kredit maksimum untuk Piutang lain-lain di laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 :

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

	30 Juni 2020		
	Belum jatuh tempo	**Kurang dari satu tahun**	**Lebih dari satu tahun**
Piutang lain-lain	8.218.240	-	-
Total	**8.218.240**	**-**	**-**

	31 Desember 2019		
	Belum jatuh tempo	**Kurang dari satu tahun**	**Lebih dari satu tahun**
Piutang lain-lain	11.581.777	-	-
Total	**11.581.777**	**-**	**-**

Risiko Likuiditas

	30 Juni 2020				
	Total	**Jatuh tempo dalam 1 tahun**	**Jatuh tempo antara 1-3 tahun**	**Jatuh tempo antara 3-5 tahun**	**Jatuh tempo lebih dari 5 tahun**
Utang usaha	1.123.151	1.123.151	-	-	-
Utang kontraktor dan konsultan	1.777.862	1.777.862	-	-	-
Beban akrual	61.254.925	61.254.925	-	-	-
Utang retensi	3.878.812	3.878.812	-	-	-
Utang obligasi	1.500.000.000	200.000.000	217.000.000	-	1.083.000.000
Total	**1.568.034.749**	**268.034.749**	**217.000.000**	**-**	**1.083.000.000**

	31 Desember 2019				
	Total	**Jatuh tempo dalam 1 tahun**	**Jatuh tempo antara 1-3 tahun**	**Jatuh tempo antara 3-5 tahun**	**Jatuh tempo lebih dari 5 tahun**
Utang usaha	660.845	660.845			
Utang kontraktor dan konsultan	1.777.862	1.777.862			
Beban akrual	31.113.473	31.113.473			
Utang retensi	2.156.217	2.156.217			
Utang obligasi	1.500.000.000	200.000.000	217.000.000	-	1.083.000.000
Total	**1.535.708.397**	**235.708.397**	**217.000.000**	**-**	**1.083.000.000**

Risiko Suku Bunga

Perusahaan tidak memiliki risiko tingkat suku bunga terutama menyangkut liabilitas keuangan. Perusahaan akan memonitor secara ketat pergerakan suku bunga di pasar dan apabila suku bunga mengalami kenaikan yang signifikan maka Perusahaan akan menegosiasikan suku bunga tersebut dengan pemberi pinjaman atau mempertimbangkan strategi lindung nilai (hedging) suku bunga. Perusahaan tidak memiliki aktivitas hedging tingkat bunga untuk mengantisipasi risiko tingkat suku bunga tersebut.

30. TUJUAN DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Kebijakan Manajemen Risiko (lanjutan)

Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan dilikuidasi. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga dipasar, model arus kas diskonto dan model penetapan harga opsi yang wajar.

Instrumen keuangan yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan dicatat sebesar nilai wajar, atau sebaliknya disajikan dalam jumlah tercatat apabila jumlah tersebut mendekati nilai wajarnya atau nilai wajarnya tidak dapat diukur secara handal.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Kuotasi nilai pasar yang digunakan Perusahaan untuk aset keuangan adalah harga penawaran (bid price), sedangkan untuk liabilitas keuangan adalah harga permintaan (ask price). Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia, dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi, apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi.

Nilai Wajar (lanjutan)

Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup :

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis dan;
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai wajar instrumen keuangan lainnya.

Manajemen Permodalan

Tujuan Perusahaan dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha sehingga dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemegang kepentingan lainnya dan memelihara struktur permodalan yang optimum. Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Perusahaan secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola permodalannya untuk memastikan struktur modal dan pengembalian yang optimal bagi pemegang saham, dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas operasi dan belanja modal serta mempertimbangkan kebutuhan modal di masa yang akan datang.

31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING

a. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol

- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai pengalihan Perjanjian Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara Ulujami - Kebun Jeruk dari Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol No. 257/PPJT/VII/Mn/2006 tanggal 7 Juli 2006 dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk (Entitas Induk), berdasarkan Akta No. 05 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, SH. Masa Konsesi Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara selama 40 (empat puluh) tahun sejak tanggal penandatanganan PPJT 1 Januari 2005.
- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No. 7 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
- Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.8 tanggal 7 Januari 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
- Perusahaan mengadakan perjanjian ulang dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengenai Perjanjian Hak Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara: Ulujami - Kebun Jeruk berdasarkan Akta No. 03 tanggal 7 Juni 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
- Amandemen I Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.24 tanggal 18 Nopember 2011 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
- Amandemen II Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.22 tanggal 24 Desember 2013 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.
- Amandemen III Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara berdasarkan Akta No.16 tanggal 22 Juni 2017 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. mengenai perubahan terhadap beberapa hal yang dimuat dalam PPJT.

b. Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT)

- Perusahaan mengadakan perjanjian dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) mengenai pengalihan perjanjian layanan dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara, berdasarkan Akta No. 8 tanggal 28 Juli 2009, dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. Perjanjian pengalihan tersebut telah diaktakan dengan Akta No. 6 tanggal 6 Mei 2010 dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H. Jumlah dana bergulir untuk penggantian pembelian tanah tersebut adalah sebesar Rp610.170.000.000 dengan jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari tanggal 18 Oktober 2009. Atas pinjaman ini dikenakan biaya provisi sebesar 1% dari nilai pinjaman atau sebesar Rp6.101.700.000 dibayarkan secara 2 tahap masing-masing sebesar 0,5% atau Rp3.050.850.000.

  Perusahaan wajib mengganti dana yang merupakan dana bergulir yang telah dipergunakan untuk pembelian tanah 1 (satu) seksi berikut nilai tambahnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penyelesaian pembebasan tanah 1 (satu) seksi tersebut termasuk tagihan penggantian dananya dari BLU-BPJT. Perusahaan mengakui utang atas penggunaan Layanan Dana Bergulir dengan perjanjian pengakuan utang yang diaktakan dengan Akta No 9 tanggal 6 Mei 2010 oleh Notaris Rina Utami Djauhari, S.H.
- Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 6 Mei 2010 mengenai Amandemen I Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggatian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2010.

31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

b. Badan Layanan Umum - Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) (lanjutan)

- Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 6 Mei 2010 yang disalin kembali dengan Akta No. 8 tanggal 7 Januari 2011 mengenai Amandemen I Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggatian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pengadaan tanah akan dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam Berita Acara Kesepakatan tentang Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara No. BA.06/BPJT/KE/HK.02.03/2011 tanggal 5 Mei 2011.
- Berdasarkan Akta No. 9 tanggal 7 Januari 2011 mengenai Amandemen II Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Rina Utami Djauhari, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2011.
- Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 13 Januari 2012 mengenai Amandemen III Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., pembagian 2 Seksi atas pembayaran ganti rugi atau penggantian pembelian tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara yaitu Seksi 1 (Kebon Jeruk - Joglo) dan Seksi 2 (Joglo - Ulujami) dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp117.791.000.000 dan Rp492.379.000.000.
- Berdasarkan Akta No. 3 tanggal 27 Juni 2012 mengenai Amandemen IV Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2012.
- Berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Pebruari 2013 mengenai Amandemen V Perjanjian Layanan Dana Bergulir untuk penggantian pembelian tanah dalam rangka Pengusahaan Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) Seksi W2 Utara dari Notaris Trie Sulistiowarni, S.H., jangka waktu pinjaman adalah maksimum sampai dengan selesainya proses pengadaan tanah, namun tidak lebih dari bulan Desember 2013.

c. Perjanjian dengan Kontraktor

- Berdasarkan Kontrak Pekerjaan Lapis Tambah (Overlay) dengan PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk No. 062/KONTRAK-DIR/MLJ/IV/2019 tanggal 29 April 2019, PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan lapis tambah ruas jalan tol lingkar luar Jakarta (JORR) seksi W2 Utara jalur A/B. Nilai kontrak untuk pekerjaan tersebut adalah sebesar Rp14.750.349.900 (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%). Masa kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani kontrak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Akhir (FHO) Hasil Pekerjaan. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 180 hari sejak tanggal 29 April 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 063/DIR-SPK/MLJ/IV/2019. PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk juga berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan pemeliharaan selama 365 hari. PT Jaya Kontruksi Manggala Pratama, Tbk dapat memeroleh pembayaran uang muka dari Perusahaan sebesar 10% dari nilai kontrak atau sebesar Rp1.475.034.990

31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

d. Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu

- Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu Jalan Tol antara Perusahaan dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) No. 235/KONTRAK-DIR/MLJ/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Perjanjian Kerjasama Operasi Terpadu Jalan Tol JORR Seksi W2 Utara, W2 Selatan, S, E1, E2, dan E3 serta Jalan Tol Ulujami - Pondok Aren, para pihak sepakat untuk mengatur kerjasama operasi terpadu. Lingkup Kerjasama Operasi Terpadu meliputi kegiatan manajemen pengumpulan tol, manajemen lalu lintas dan manajemen pemeliharaan.

- Perusahaan, PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Hutama Karya (Persero) masing-masing bertanggungjawab atas pengoperasian dan pemeliharan masing-masing Jalan Tol yang menjadi wewenang penyelenggaraannya atas biaya dan risiko masing-masing yaitu (a) Perusahaan bertanggung jawab untuk Jalan Tol JORR Seksi W2 Utara; (b) PT Jasa Marga (Persero) Tbk bertanggungjawab untuk Jalan Tol JORR Seksi Non-S; dan (c) PT Hutama Karya (Persero) bertanggungjawab untuk Jalan Tol JORR Seksi S. Proporsi pendapatan tol untuk periode Januari 2015 sampai Desember 2016 adalah JORR Seksi W2 Utara sebesar 14,42%, JORR Seksi W2 Selatan sebesar 12,45%, JORR Seksi S sebesar 36,43%, JORR Seksi E1 sebesar 24,55%, JORR Seksi E2 sebesar 10,81%, dan JORR Seksi E3 sebesar 1,34%. Untuk periode tahun 2017, para pihak sepakat untuk melakukan survei/kajian/studi oleh Konsultan Independen. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2016 shift II sampai dengan berakhirnya salah satu dari PPJT JORR Seksi Non-S, PPJT JORR Seksi S, dan PPJT W2 Utara, mana yang lebih dahulu berakhir.
- Perusahaan telah menandatangani Berita Acara Kesepakatan Rapat Pembahasan Integrasi Sistem Transaksi Pembayaran Tol Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta Seksi W1 (Penjaringan – Kebon Jeruk), Seksi W2 Utara (Kebon Jeruk – Ulujami), Seksi W2 Selatan (Ulujami – Pondok Pinang), Seksi S (Pondok Pinang – Taman Mini), Seksi E1 (Cakung – Rorotan), Jalan Tol Akses Tanjung Priok Seksi E-1, E-2, E2A, NS (Rorotan-Kebon Bawang), dan Jalan Tol Pondok Aren Ulujami bersama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero) dan PT Jakarta Lingkar Baratsatu terkait pelaksanaan integrasi dan proporsi bagi hasil pendapatan tol yang akan digunakan secara terus menerus.

e. Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Peralatan Tol

- Berdasarkan Kontrak Jasa Pemborongan antara Perusahaan dengan PT Module Intracs Yasatama No. 060/KONTRAK-DIR/MLJ/X/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Kontrak Jasa Pemborongan Pekerjaan Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Peralatan Tol pada Jalan Tol Ruas Lingkar Luar Jakarta (JORR) W2 Utara: Kebon Jeruk - Ulujami, dengan nilai kontrak sebesar Rp20.897.805.000 yang masing-masing terdiri dari untuk pekerjaan pengadaan sebesar Rp14.456.557.500 dan pekerjaan pemeliharaan sebesar Rp6.441.247.500. Jangka waktu perjanjian terdiri dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pengadaan 330 hari kalender sejak tanggal Surat Mulai Perintah kerja (SPMK), jangka waktu kestabilan sistem 90 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Pertama pekerjaan pengadaan, jangka waktu masa garansi 270 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Kedua pekerjaan pengadaan, dan jangka waktu pekerjaan pemeliharaan 1826 hari kalender sejak Berita Acara Serah Terima Akhir pekerjaan pengadaan.

31. PERJANJIAN DAN PERIKATAN PENTING (lanjutan)

f. Pekerjaan pengadaan Jasa Pengemudi dan Sewa Kendaraan Operasional

- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Pengemudi Operasional dengan PT Multiartha Adhi Sarana No. 109/KONTRAK-DIR/MLJ/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 mengenai Pekerjaan Jasa Pengemudi Operasional (Patroli, Ambulance, Rotasi Antar Jemput Pengumpul Tol). Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 8 Juni 2018 sampai dengan 7 Juni 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.466.143.543.
- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional dengan PT Pulo Airbiru No. 244/KONTRAK-DIR/MLJ/XII/2016 tanggal 16 Desember 2016 mengenai Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Operasional Jalan Tol (Kendaraan Patroli, Patroli Jalan Raya, Rotasi Antar Jemput Karyawan dan Operasional Pelayanan Lalu Lintas). Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 36 bulan mulai 16 Desember 2016 sampai dengan 15 Desember 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.088.008.000.
- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional dengan PT Pulo Airbiru No. 058/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 mengenai Pekerjaan Jasa Sewa Kendaraan Dinas dan Operasional Jalan Tol (Kendaraan Pool, Kendaraan Dinas Operasional). Jangka waktu pelaksanaan ditetapkan selama 36 bulan mulai 16 Mei 2017 sampai dengan 15 Mei 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.756.260.000.

g. Pekerjaan Pengadaan Jasa Penderekan

- Berdasarkan Kontrak Jasa Pengadaan Jasa Penderekan antara Perusahaan dengan PT Armada Antar Lintasnusa No. 009/KONTRAK-DIR/MLJ/I/2017 tanggal 9 Januari 2017 tentang Kontrak Jasa Pengadaan Jasa Penderekan di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta JORR W2 Utara (Kebun Jeruk – Ulujami) KM.08+330 – km.16+200, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.154.015.000 (sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10%). Jangka waktu perjanjian selama 24 bulan terhitung sejak 9 Januari 2017 sampai dengan 8 Januari 2019.

h. Pekerjaan Pengadaan Jasa Cleaning Service dan Pengemudi Pool

- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Cleaning Service dan Pengemudi Pool dengan PT Jalur Ekspres Solusindo No. 170/KONTRAK-DIR/MLJ/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018 mengenai Pekerjaan Jasa Cleaning Service dan Pengemudi Pool. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan 29 Agustus 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.699.272.000.

i. Pekerjaan Pengadaan Jasa SATPAM Gerbang Tol dan Wilayah Koridor

- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa SATPAM Gerbang Tol dan Wilayah Koridor dengan PT Karya Prima Usahatama No. 085/KONTRAK-DIR/MLJ/IV/2018 tanggal 30 April 2018 mengenai Pekerjaan Jasa SATPAM Gerbang Tol dan Wilayah Koridor. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 36 bulan terhitung sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan 29 April 2021 dengan nilai kontrak sebesar Rp3.892.542.607.

j. Pekerjaan Pengadaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kebersihan Gerbang Tol Paket 1

- Perusahaan mengadakan Kontrak Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kebersihan Gerbang Tol Paket 1 dengan PT Widyamita No. 087/KONTRAK-DIR/MLJ/V/2018 tanggal 3 Mei 2018 mengenai Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Rutin Kebersihan Gerbang Tol Paket 1. Masa pelaksanaan pekerjaan adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan 2 Mei 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.125.125.000.

32. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Laba (rugi) bersih per saham dasar dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham, dengan rincian sebagai berikut :

	30 Juni 2020	30 Juni 2019
Laba (rugi) tahun berjalan	(13.193.720)	12.285.721
Rata-rata tertimbang saham	655.727	655.727
Laba (rugi) bersih per saham dasar	**(20,12)**	**18,74**

33. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

a. Setelah tanggal neraca, Perusahaan telah melihat adanya ketidakpastian ekonomi makro sehubungan dengan bisnis jalan tol sebagai dampak dari wabah Covid-19 (Corona Virus). Lebih lanjut, perkembangan dan ketidakpastian global baru-baru ini pada bulan Maret 2020 telah menyebabkan perubahan besar dalam tingkat lalu lintas. Durasi atas perkembangan ini masih belum dapat dipastikan, namun dapat memengaruhi pendapatan, arus kas, dan kondisi keuangan. Terhadap dampak wabah Covid-19 ini, Perusahaan telah melakukan antisipasi dengan melakukan upaya penghematan dan penundaan beberapa program kerja yang dirasakan tidak terlalu mendesak tanpa mengabaikan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum).

b. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.
   Tarif pajak yang baru tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengukuran aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan mulai sejak tanggal berlakunya peraturan tersebut yaitu 31 Maret 2020.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan isi laporan keuangan yang disetujui untuk terbit tanggal 27 Juli 2020.